

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fakur Rohman ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Oleh:
Pembimbing,



Titik Triwulan Tutik, SH.,MH.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fakur Rohman ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Titik Triwulan Tutik, SH.,MH

NIP. 196803292000032001

Sekretaris,

Sri Wigati, M.El

NIP. 197302212009122001

Penguji I,

Drs. Ach. Yasin, M.Ag

NIP. 196707271996031002

Penguji II,

Arif Wijaya, SH., M.Hum

NIP.197107192005011003

Pembimbing

Titik Triwulan Tutik, SH.,MH

NIP. 196803292000032001

Surabaya, 15 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq

NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fakur Rohman

NIM : CO3207005

Institusi : Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini, secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, bukan hasil dari plagiat, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2011

Saya yang menyatakan,



Fakur Rohman
NIM. C03207005

ABSTRAK

Judul penelitian adalah : Sanksi pidana terhadap anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak pascaputusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dalam kajian Fikih Jinayah. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: Bagaimanakah sanksi pidana bagi anak pascaputusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak? Bagaimanakah pandangan Fikih Jinayah terhadap sanksi pidana bagi anak pascaputusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak?

Berkenaan dengan hal itu digunakan metode deskriptif-analisis untuk memberikan gambaran tentang sanksi pidana bagi anak pascaputusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan masalah tersebut sumber data yang digunakan antara lain berupa dokumen putusan, undang-undang dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian di atas.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sanksi yang diberikan terhadap anak pascakeluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 adalah apabila anak sudah berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut ialah: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda; atau pidana pengawasan. Dan sanksi bagi anak dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Sedangkan apabila anak tersebut melakukan tindak pidana tetapi usianya kurang dari 12 tahun maka apabila masih dapat dibina orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, apabila tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Sedangkan menurut pandangan Fikih Jinayah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak usia 12 tahun lebih menjamin hak anak. Sehingga lebih mendekatkan pada kemaslahatan anak. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada tanggung jawab hukum atas seorang anak sampai dia mencapai umur *baligh*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan: Perlunya sosialisasi penyadaran hukum kepada masyarakat baik tentang hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi anak agar dapat memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anak secara benar. Perlunya pengkajian ulang oleh praktisi hukum tentang sanksi bagi anak yang tidak mengabaikan dampak sosiologi dan psikologi anak, karena hal tersebut merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan setelah diterapkannya suatu hukuman yang pada akhirnya hukuman itu sesuai dengan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Batasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Kegunaan Penelitian	16
G. Kajian Pustaka	17
H. Definisi Operasional	20

I. Metode Penelitian.....	21
J. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II: SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM.....	26
A. Sekilas Pandang Hukum Pidana Islam	26
B. Unsur-Unsur Hukuman Dalam Islam	34
C. Kriteria Anak Menurut Hukum Islam	36
D. Sanksi Pelaku Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam	39
BAB III: PUTUSAN <i>JUDICIAL REVIEW</i> MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PASAL 1 ANGKA (1), PASAL 4 AYAT (1), DAN PASAL 5 AYAT (1) UU No. 3 TAHUN TENTANG PENGADILAN ANAK	41
A. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	41
B. Pertimbangan Hukum Pemohon dalam Perkara Uji Materiil.....	45
C. Pendapat Para Pihak Tentang Permohonan Perkara Uji Materiil	54
D. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan No. 1/PUU-VIII/2010.....	58
BAB IV: PANDANGAN FIKIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN <i>JUDICIAL REVIEW</i> MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PASAL 1 ANGKA (1), PASAL 4 AYAT (1), DAN PASAL 5 AYAT (1) UU No. 3 TAHUN TENTANG PENGADILAN ANAK	67
A. Sanksi Pidana Bagi Anak PascaPutusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 Mengenai Pidana Anak	67

B. Pandangan Fikih Jinayah Tentang Sanksi Pidana Bagi Anak PascaPutusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 Mengenal Pidana Anak.....	74
BAB V: PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran.....	79
DAFTAR PUSATAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seringkali orang tua tidak mengerti bahwa mereka telah melakukan kesalahan terhadap anak-anak mereka atau bahkan mereka telah menelantarkan anak-anak mereka. Bagi keluarga, anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai dua potensi, yaitu bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk, baik buruknya anak sangat erat kaitannya dengan didikan yang diberikan oleh faktor lingkungan.¹

Kasih sayang merupakan kebutuhan pokok yang bersifat kejiwaan bagi setiap anak. Kebutuhan pokok tersebut menuntut pemenuhan sedini mungkin sebagai modal utama bagi perkembangan jiwa anak.²

Dunia anak merupakan dunia yang paling unik, penuh keceriaan, kegembiraan, fantasi dan suka cita. apa yang mereka lakukan adalah apa yang mereka inginkan. oleh karena itu, pertumbuhannya harus diperhatikan baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan psikis. Hal ini dilakukan agar masa depan mereka menjadi generasi muda dan manusia yang seutuhnya baik jasmani

¹ Lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak remaja ke penyalahgunaan minuman memabukkan dan sejenisnya terutama faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, keadaan di sekolah, pengaruh teman sepergaulan dan keadaan masyarakat pada umumnya. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2007), 83

² Sudarsono, *Kenakalan Remaja prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 154

maupun rohani. Hal ini disebabkan karena perkembangan fitrah manusia banyak tergantung pada usaha didikan dan bimbingan orang tua.

Dengan demikian anak hendaklah diberi perhatian agar masa depannya lebih terarah, apalagi jaman yang penuh dengan bermacam-macam fenomena yang bisa merusak anak di saat sekarang.

“Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”.³

Dalam rangka pembinaan generasi muda sebagai penerus bangsa menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, diperlukan perangkat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan kesejahteraan anak-anak utamanya bagi anak-anak yang melakukan suatu pelanggaran baik yang bersifat kriminal maupun yang melanggar ketertiban umum.

Dalam proses perkembangan tidak jarang timbul peristiwa-peristiwa yang menyebabkan anak dalam keadaan terlantar maupun terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur berupa ancaman pelanggaran terhadap ketertiban umum dan masyarakat, bahkan ada kecenderungan adanya penyalahgunaan anak bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang justru dilakukan oleh para orang tua atau pembimbingnya.

³ UU No. 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Bagian Penjelasan Umum

Menurut Islam disebut anak adalah jika belum mencapai umur *baligh*, dimana batas umur *baligh* apabila kalau laki-laki sudah bermimpi dan mengeluarkan air mani dan anak perempuan apabila sudah datang haid. Salah satu cerita mengenai usia anak adalah ketika Nabi Muhammad saw. menikahi ‘Aisyah binti Abu Bakar dimana ‘Aisyah dinikahi Nabi tidak lama setelah Nabi menikahi Saudah. Ketika itu ‘Aisyah masih berusia enam atau tujuh tahun¹⁰ dan Nabi Muhammad saw menggaulinya setelah berumur 9 tahun.¹¹

Sedangkan Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, kriteria anak dibawah umur dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hukum perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu menikah.¹² Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka 21 tahun,

¹⁰ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta : elSAQ Press, 2005), 82

¹² Lihat: Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- a. Hak atas kelangsungan hidup;
- b. Hak atas tumbuh dan berkembang, dan;
- c. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Dalam pelaksanaan peradilan anak memerlukan dasar filosofi, etis dan yuridis untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan. Dan jaminan pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dipahami oleh banyak orang.²¹

Pengakuan, penghormatan dan jaminan serta perlindungan hak-hak anak dimaksud merupakan realisasi dari kewajiban negara dan sekaligus pemenuhan hak-hak kewarganegaraan sebagai suatu “penganugerahan hak-hak sosial kepada rakyatnya”. Dalam UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak juga menegaskan, bahwa:

²¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 26

janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.²⁶

Kata Syariat dalam ayat di atas dihubungkan dengan Allah, sehingga para ulama usul Fikih memahami konsep Syariat tersebut sebagai teks-teks kalamullah yang bersifat syar'i.²⁷

Dan tidak diragukan lagi bahwa agama Islam diarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki penciptanya Yang Maha Bijaksana. Demikianlah Hukum Islam mempunyai tujuan. Tujuan Hukum Islam itu pada hakikatnya adalah tujuan pencipta Hukum Islam itu sendiri. Tujuan Hukum Islam itu menjadi arah setiap perilakudan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mentaati semua hukum-hukum-Nya.²⁸

Dari uraian latar belakang di atas, yaitu tentang permasalahan UU No. 3 Tahun 1997 terhadap pasal 28B ayat 2 UUD 1945 dalam masalah sanksi pidana terhadap anak yang dilakukan anak di bawah umur dalam Hukum Islam penulis tertarik untuk menganalisa dari dua pemahaman berdasarkan hukum yang di satu sisi mengedepankan aspek perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan, dan di sisi lain penerapan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

²⁶ Depag RI, *Al Qur'an dan terjemah*, 1044

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 37.

²⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas LPPM, 1995), 99

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa pembatasan yang dapat dijadikan suatu pijakan obyek penelitian agar peneliti lebih jeli dalam membahas masalah tersebut. Maka dalam studi ini akan diidentifikasi kedalam beberapa masalah, yaitu :

1. Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang usia anak terkait dengan sanksi pidana.
2. Bagaimana Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang mengatur tentang sanksi pidana bagi anak.
3. Bagaimanakah Hukum Islam mengatur tentang sanksi pidana bagi anak

C. Batasan Masalah

Kemudian, untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini terbatas pada “batas usia pidana anak pascaputusan Mahkamah Konstitusi dalam kajian Fikih Jinayah”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

5. Mahkamah Konstitusi,³⁵ merupakan lembaga baru yang diberi kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) juncto pasal 10 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003), yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai sanksi pidana anak pascakeluarnya putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam kajian Fikih Jinayah.

1. Data yang dikumpulkan

Secara global data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah :

³⁵ Lihat: UUD 1945, dan UU No. 24 Tahun 2003 *Tentang Mahkamah Konstitusi*.

- a) *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain.
- b) *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.
- c) *Analizing*, yaitu melakukan analisa/tinjauan hukum terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang telah dianalisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan analisa sebagai berikut.

a. Deskriptif

suatu cara menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh pemahaman secara menyeluruh.

b. Deduktif

Adalah pola pikir yang membahas persoalan yang dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum berupa dalil, kaidah fikih, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan ini, penulisan skripsi dibagi ke dalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

Bab Pertama: Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah bagi penelitian ini, dari latar belakang tersebut dirumuskan suatu pokok masalah, tujuan penelitian dan kegunaan diadakannya penelitian ini, lalu kajian pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian disusul dengan pembahasan

BAB II

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Sekilas Pandang Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fikih Jinayah. Fikih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Hukum Pidana Islam merupakan Syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.¹

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkahlaku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2007), 1

Surat al-Israa' ayat 15

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya :

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.⁶

Surat al-Maidah ayat 95

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا
لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۚ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۚ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. barangsiapa di antara kamu

⁶ *Ibid.*, 561

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.¹⁰

Disamping asas-asas umum tersebut diatas, di lapangan hukum pidana juga terdapat asas-asas Hukum Islam. Di antaranya adalah :

¹⁰ Depag RI, *Al Qur'an dan terjemah*, 48

2

2

2

2

2

2

2

Unsur-Unsur Hukuman Dalam Islam

1. Unsur Formil (adanya Undang-Undang atau Nash) yaitu, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya Nash atau Undang-Undang yang mengaturnya. Dimana suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dikenai sanksi sebelum adanya peraturan. Sedangkan unsur Formil dalam Syariat Islam lebih dikenal dengan istilah "*Ar Ruknasy-Syr'i*".¹³
2. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil yang dalam Hukum pidana Islam disebut dengan "*Ar-Rukum Almadi*" yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt. (Pencipta manusia).

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 7

¹³ Siti Nuraini, "Unsur-unsur Hukum Pidana Islam" <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2171324-unsur-unsur-tindak-pidana/>, (13 Agustus 2011)

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu diungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi (a) *jarimah hudud*, (b) *jarimah qishash*, dan (c) *jarimah ta'zir*.
2. Dari segi unsur niat, ada dua *jarimah*, yaitu (a) yang sengaja, dan (b) tidak sengaja.
3. Dari segi cara mengerjakan, ada dua *jarimah*, yaitu (a) yang positif, dan (b) tidak sengaja.
4. Dari segi si korban, *jarimah* itu ada dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan (b) kelompok.

5. Dari segi tabiat, *jarimah* terbagi dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan (b) bersifat politik.¹⁴

B. Kriteria Anak Menurut Hukum Islam

Maksud kriteria di bawah umur ialah anak yang belum akil *baligh* (belum *mukallaf*), baik karena akal nya belum matang atau karena yang lainnya. Ia harus diawasi dan dijaga oleh walinya.

Ciri-ciri seorang *baligh* adalah sebagai berikut :

- a. Secara yuridis telah berusia 15 tahun bagi laki-laki atau haidh bagi perempuan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. berkata yang Artinya:

“Aku dibawa kepada Nabi Muhammad saw. (untuk berperang) pada perang Uhud, sedang aku umur 14 tahun, maka aku tidak dibolehkannya. Akupun pernah lupa dibawa (untuk turut berperang) pada hari perang khandak dan aku berumur 15 tahun, maka dibolehkannya aku.”

- b. Secara psikologis telah tumbuh rambut di kemaluan, dinyatakan dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan tirmidzi dari 'Athiyyah al-Quraidza r.a. berkata yang Artinya:

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 22

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, *ikhtilam* dan belum pernah hamil. Menurut *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan. Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan *ikhtilam* namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.¹⁸

C. Sanksi Pelaku Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi pidana dalam Fikih Jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi sipelaku itu sendiri. Hal yang pertama, perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang biasanya disebut dengan unsur pembeda.

Adapun kedua, perbuatan sipelaku tetap haram akan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi si pelaku itu sendiri biasanya disebut dengan unsur pemaaf.¹⁹ Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Umar bin Khattab: “Apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau

¹⁸ Abdullah Alif Alit Al-jawi, (Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam), <http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-islam> (05 Juli 2011)

19 A, Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Cet. 3 (Jakarta : RajaGrafindo Persada 2000), 243

BAB III

PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PASAL 1 ANGKA (1), PASAL 4 AYAT (1), DAN PASAL 5 AYAT (1) UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

A. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

Sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang sangat penting dan mendasar. Perubahan tersebut merupakan hasil amendemen UUD 1945 yang telah dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan *checks and balances* yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu hasil amendemen UUD 1945 itu adalah pembentukan lembaga Negara baru yang disebut Mahkamah konstitusi (MK).¹

Pembentukan MK merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-lembaga Negara. Pembentukan MK merupakan penegasan terhadap prinsip Negara hukum dan perlunya

¹ Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, (Jakarta: Mhkamah Konstitusi, 2004), 3

perlindungan hak asasi manusia (*hak konstitusional*) yang telah dijamin konstitusi. Selain itu pembentukan MK dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian beberapa problem yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan. Dalam konteks dunia, keberadaan MK merupakan salah satu hasil perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20.

Ide pembentukan MK kemudian dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 (2) dan pasal 24C perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR 9 November 2001. Permasalahan yang diatur adalah soal kedudukan dan wewenang MK serta babarapa hal mengenai hakim konstitusi. Selanjutnya menyangkut masalah pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang MK, UUD menginginkan hal tersebut diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Ditentukan pula, pembentukan MK selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003. Sementara belum terbentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.²

Pengaturan lebih lanjut mengenai MK dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, dan telah disetujui dalam bentuk Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Melengkapi pembentukan MK dan sebagai pelaksana atas perintah UUD dan UU Mahkamah Konstitusi, tiap lembaga DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung merekrut tiga

² *Ibid.* 4

pemerintahan selalu terbangun oleh dan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan ketentuan konstitusi.

Disamping itu, MK berperan dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi prinsip-prinsip demokrasi. Adanya MK juga memberikan harapan baru bagi pencari keadilan di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan kepada institusi keadilan.

Dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan peran itulah kemudia MK menetapkan visi-misinya kedepan. Visinya adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita Negara hukum dan demokrasidemi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Misinya adalah *pertama*, mewujudkan MK sebagai salah satu pelaksanan kekuasaan kehakiman yang terpercaya. *Kedua*, membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Sedangkan kedudukan MK diletakkan dalam konsep kekuasaan kehakiman merdeka dan menjadi salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pada pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, menyatakan MK merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴

⁴ *Ibid.* 7

Para pemohon mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: Bahwa Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan;

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.⁶

Di dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi dimaksudkan: *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah-tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggungjawab. *Ketiga*, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁷

Untuk melaksanakan amanat konstitusional tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kedudukan hukum (*Legal Standing*) pemohon. karena dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang MK menyatakan, bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:⁸

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat, atau;

⁶ *UUD 1945 Pascaamandemen*

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006). 163-164

⁸ *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* No. 24 tahun 2003

1. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 1 butir 2 huruf b UU Pengadilan Anak, sepanjang frasa, *"Maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan"*, dianggap bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana positif yang mengandung unsur *lex scripta*, *lex certa*, *non retroaktif*, dan dilarang menggunakan konstruksi, termasuk analogis, dengan ketentuan a quo berarti menormakan kriminalisasi anak, dan pada gilirannya mengakibatkan anak-anak dapat diajukan ke sidang anak yang selanjutnya dapat dijatuhi pidana, karenanya menurut para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak, sepanjang frasa, *"Sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun"* bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat UUD 1945 karena batas umur anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun yang dapat diajukan ke sidang anak tersebut terlalu rendah, bukan saja tidak memenuhi rasa keadilan, akan tetapi melanggar hak konstitusional anak yang dijamin dalam Pasal 28B ayat UUD

[illegible]

1945. Hak tumbuh kembang anak terlanggar, karena pemidanaan anak akan membawa anak ke Sidang Anak merupakan bentuk perampasan kemerdekaan dan tumbuh kembang anak, karena:

- a. Batas usia tanggung jawab pidana anak terlalu rendah dibandingkan usia boleh bekerja.
- b. Batas usia tanggung jawab pidana anak melanggar hak konstitusional anak atas pendidikan.
- c. Usia tanggung jawab pidana anak dalam UU Pengadilan Anak jauh lebih rendah dibandingkan berbagai negara.
- d. Sistem peradilan pidana anak, masih merupakan turunan dari sistem peradilan untuk orang dewasa.
- e. Anak bukan pelaku tindak pidana otentik, namun terkait situasi lingkungan sosialnya.

Bahwa secara konstitusional tidak ditemukan rujukannya memberikan batas usia tanggung jawab pidana kepada anak sekurang-kurangnya 8 tahun, sehingga rujukannya semestinya ditelaah berdasarkan sejarah hukum, peraturan perundang-undangan, maupun instrumen internasional;

3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak, sepanjang frasa, *"Belum mencapai umur 8 (delapan) tahun"* dianggap bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena terlalu rendah dalam menentukan batas usia tersebut guna dilakukan

proses hukum oleh Penyidik. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak tetap mempersamakan perlakuan proses penyidikan seperti halnya penyidikan untuk "pro justisia" yang diajukan ke Sidang Anak seperti Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak dengan pemeriksaan penyidik untuk anak kurang 8 tahun Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah sama saja karena yang diberlakukan adalah KUHAP juga oleh penyidik;¹²

C. Pendapat Para Pihak Tentang Permohonan Perkara Uji Materiil

Menurut keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR ingin menyampaikan penjelasan/ keterangan sebagai berikut: Bahwa terhadap pendapat para Pemohon yang menyatakan batas usia sekurang-kurangnya 8 tahun bertentangan dengan masa tumbuh kembang anak, usia mengenyam pendidikan, dan berada dalam keluarga. Selain itu usia tanggung jawab pidana sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dinilai tidak adil karena jauh lebih rendah dibanding batas usia anak boleh bekerja, serta melanggar hak konstitusional anak atas pendidikan, DPR berpandangan bahwa penentuan batas usia 8 tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke sidang anak adalah merupakan kebijakan pembuat Undang-Undang dengan didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, bahwa anak yang berusia 8 (delapan) tahun dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*vide* Penjelasan

¹² Lihat: *Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010*, 109-111

- a. 0-7 tahun (belum *mumayyiz*), tidak dapat diminta pertanggungjawaban, tidak dijatuhkan hukum pidana, hanya dapat diberikan tindakan yang bersifat mendidik;
 - b. 7 tahun – usia *aqil baligh*, dikenakan hukuman yang bersifat mendidik, bukan hukum pidana, jika perbuatannya merugikan orang lain secara materil maka dimintakan ganti rugi melalui orang tua/walinya;
 - c. Dewasa, usia *al-baligh al-rasyid (aqil baligh)*, dapat dikenakan sanksi pidana;
1. Dalam syariat Islam, sistem peradilan belum berlaku bagi anak karena anak belum dikenakan beban hukum (*taklif*) dengan kata lain anak tidak termasuk subjek hukum pidana. Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dikenakan sanksi pidana melainkan sanksi yang bersifat mendidik (edukatif dan rehabilitatif);
 2. Dalam pandangan Syariat Islam, p fase perkembangan manusia ada 3 phase:
 - a. Sejak lahir sampai usia 7 tahun merupakan phase seseorang belum mempunyai kemampuan berfikir (*idrak*) dan *ikhtiyar*. Pada phase ini, seseorang tidak dapat dimintakan tanggung jawab apapun atas perbuatannya;

- Sedangkan dari keterangan ahli pemerintah, Dr. Mudzakkir, S.H., M.H yang menyatakan meskipun Komite Hak-Hak Anak PBB telah merekomendasikan batas minimum pertanggungjawaban hukum anak, yakni 12 tahun, namun batas usia demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk menafsirkan konstitusionalitas batas pada Pasal 4 ayat (1) dan 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak.

Mahkamah menyatakan pendapatnya terhadap pasal 1 angka (1), pasal 4 ayat (1), dan pasal 5 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang diajukan sebagai pokok permohonan dalam uji materiil. Mahkamah

3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yaitu mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu Negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum, unifikasi hukum nasional, sosial kontrol, dan memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga Negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaannya.
4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Yaitu menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan Negara, misalnya simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, Negara hukum, yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan Negara.
5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan.
6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga Negara. Yaitu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga Negara. Hal ini merupakan pengejawantahan suatu Negara hukum.

Berdasarkan uraian di atas, sebagai konsekuensi negara hukum yang demokratis, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, tidak hanya berarti bahwa proses pembentukan hukum dan materi muatannya (*in casu* undang-undang) harus mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga berarti bahwa praktik demokrasi harus tunduk pada

prinsip negara hukum (*rechtsstaat, rule of law*) yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*supreme law*). Oleh karena itulah, Undang-undang, baik proses pembentukannya maupun materi muatannya, dapat diuji terhadap undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi.¹⁶

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mengandung amanat konstitusi untuk mengawal konstitusi. Artinya, Mahkamah harus memastikan tidak ada undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara semata-mata karena alasan menciptakan tertib hukum. Namun, di lain pihak, Mahkamah juga harus memastikan tidak terjadi keadaan yang dengan alasan melindungi hak konstitusional warga Negara mengesampingkan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa setiap undang-undang adalah konstitusional (*principle of constitutionality*) sampai terbukti melalui proses peradilan di hadapan Mahkamah bahwa undang-undang yang bersangkutan inkonstitusional;¹⁷ Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

¹⁶ Lihat: *Dokumen Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008*, hal, 96

¹⁷ *Ibid.* 105

Mahkamah memandang batasan umur telah menimbulkan berbagai penafsiran dan kontroversi pemikiran sehingga perlu ada batasan usia yang serasi dan selaras dalam pertanggungjawaban hukum bagi anak yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak dengan mendasarkan pada pertimbangan hak-hak konstitusional anak. Mahkamah menemukan adanya perbedaan antara batas usia minimal bagi anak yang dapat diajukan dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan. Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dapat dilakukan penyidikan, sedangkan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa apabila anak nakal belum mencukupi umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau seumur hidup maka terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak tidak dapat dilakukan apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun. Dari pengaturan hukum mengenai batas umur, baik dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan tersebut merupakan jenis dan materi muatan dari pertanggungjawaban hukum (pidana) yang seharusnya ketiganya mengandung kesesuaian karena jenis dan materinya sama sehingga harus konsisten sesuai dengan asas-asas hukum yang dituangkan dalam Pasal 5 huruf c Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa Mahkamah berpendapat¹⁸, batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak untuk diajukan ke sidang dan belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, secara faktual benar, umur a quo relatif rendah. Penjelasan Undang-Undang a quo menentukan batas umur 8 (delapan) tahun secara sosiologis, psikologis, pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Meskipun dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menerapkan pula asas praduga tak bersalah, menurut Mahkamah, fakta hukum menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam proses penyidikan, penahanan, dan persidangan, sehingga menciderai hak konstitusional anak yang dijamin dalam UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan (*protection right*) dan hak untuk tumbuh dan berkembang (*development right*), Mahkamah berpendapat bahwa konvensi internasional, rekomendasi Hak-Hak Anak PBB, dan instrumen hukum internasional lainnya batas umur 12 tahun dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan batas usia minimal bagi anak dalam pertanggungjawaban hukum. Namun, Mahkamah berpendapat bahwa instrumen hukum internasional dan

¹⁸ Lihat : *Dokumen Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010*, 150

Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pasal a quo tidak dimintakan pengujiannya oleh para Pemohon, namun Pasal a quo merupakan jiwa atau ruh dari Undang-Undang Pengadilan Anak, terutama Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU pengadilan Anak, sehingga batas umur minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yakni 12 (dua belas) tahun. Bahwa sejatinya, menurut Mahkamah, bukan hanya Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang akan berpengaruh dengan dihapuskannya frasa, *“sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun”* dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa *“...belum mencapai umur 8 (delapan)*

Bahwa meskipun yang dimohonkan pengujian hanya Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa, *“...sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun...”* dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa, *“...belum mencapai umur 8 (delapan) tahun...”*, namun Mahkamah sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-Undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional yang dikonstruksikan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, norma-norma pasal yang lain dalam Undang-Undang ini, yaitu Pasal 1 angka 1 dan penjelasan UU Pengadilan Anak sepanjang mengandung frasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Bahwa meskipun yang dimohonkan pengujian hanya Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa, *“...sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun...”* dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa, *“...belum mencapai umur 8 (delapan) tahun...”*, namun Mahkamah sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-Undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional yang dikonstruksikan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, norma-norma pasal yang lain dalam Undang-Undang ini, yaitu Pasal 1 angka 1 dan penjelasan UU Pengadilan Anak sepanjang mengandung frasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

BAB IV

PANDANGAN FIKIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PASAL 1 ANGKA 1, PASAL 4 AYAT (1), PASAL 5 AYAT (1) UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

A. Sanksi Pidana bagi Anak Pascaputusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010

Mengenai Pidana Anak

Sebagaimana sudah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya bahwa banyak sekali Undang-undang maupun Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi hukuman bagi anak-anak pelaku tindak pidana. Dalam beberapa Bab yang terkandung dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terdapat Bab yang mengatur tentang pembedaan terhadap batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak yaitu dalam Bab I Pasal 4. Sebelum membahas lebih jauh tentang batas usia seorang anak yang dapat dipidana, akan lebih menarik bila terlebih dahulu mencermati pengertian anak dari berbagai disiplin ilmu yang ada. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, kriteria anak dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu

- a. dipergunakan sebagai pegangan dalam pembinaan anak khususnya, dan generasi muda pada umumnya sebagai berikut:⁶

Bayi	: 0-1 tahun	Pemuda	: 15-30 tahun
Anak	: 1-12 tahun	Dewasa	: 30 tahun keatas
Remaja	: 12-15 tahu		

Di dalam putusan batas usia anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangannya terhadap pokok perkaranya, yaitu Undang-undang yang menurut pemohon telah menghilangkan hak konstitusionalnya. Karena UUD 1945 sendiri mengandung norma-norma konstitusional Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak dan frasa belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat, artinya inkonstitusional kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban pidana.

⁶ Ade Maman Suherman, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar batasan umur*, 44

Berdasarkan pandangan hukum dari ahli Pemerintah, Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., ahli Pemohon, Dr. Surastini, S.H., M.H., Fentiny Nugroho, M.A., Ph.D, Prof. Bismar Siregar, Hj. Aisyah Amini, dan Adi Fahrudin, Mahkamah memandang batasan umur telah menimbulkan berbagai penafsiran dan kontroversi pemikiran sehingga perlu ada batasan usia yang serasi dan selaras dalam pertanggungjawaban hukum bagi anak yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak dengan mendasarkan pada pertimbangan hak-hak konstitusional anak. Mahkamah menemukan adanya perbedaan antara batas usia minimal bagi anak yang dapat diajukan dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan.

Penetapan umur minimal 12 tahun sebagai ambang batas umur pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian negara-negara sebagaimana juga direkomendasikan oleh Komite Hak Anak PBB dalam General Comment, 10 Februari 2007. Dengan batasan umur 12 tahun maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4). Penetapan batas umur tersebut juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12

Namun ada beberapa substansi dalam UU tersebut yang mengandung kelemahan. Berkaitan dengan usia anak nakal. Dalam pasal 1 angka (1) dinyatakan anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Batas usia anak tersebut harus diubah, sebab pada usia tersebut anak-anak tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan sidang pengadilan anak atas tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus melalui mekanisme tersendiri yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku anak tersebut ke arah lebih baik.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang sanksi pidana yang dilakukan oleh anak, itu telah mempertimbangkan dan merealisasikan hak-hak anak sebagai warga negara, Yaitu memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi”, dan hak untuk mendapatkan persamaan (*al-musyāwah*) di muka hukum dan pemerintahan, sehingga dapat dikatakan sesuai dengan Hukum Islam karena tidak bertentangan dengan Fikih Jinayah yaitu sebuah penerapan tujuan Hukum Islam dalam putusan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kadar kemampuan dan cakrawala berpikir penyusun mengenai sanksi pidana bagi anak, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pokok permohonan perkara pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan persamaan hak bagi rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang sanksi pidana yang dilakukan oleh anak, itu telah mempertimbangkan dan merealisasikan hak-hak warga negara, Yaitu memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, dan hak untuk mendapatkan persamaan di muka hukum dan pemerintahan.

2. Pandangan Fikih Jinayah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang sanksi pidana bagi anak, sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak usia 12 tahun lebih menjamin hak anak sehingga lebih mendekatkan pada kemaslahatan anak. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman kerana kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada sanksi hukuman atas seorang anak sampai dia mencapai umur *baligh*. Dimana secara psikologis

DAFTAR PUSTAKA

- A, Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Cet. 3, 2000
- A. Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Penerjemah:Wadi Masturi, Basri Iba Asghary, Jakarta, Rineka Cipta,1992
- Ade Maman Suherman, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar batasan umur)*, Jakarta, Nasional Legal Reform Program, 2010
- Agung Wahyon dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar grafika,1993
- Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fat-HulQorib*, Penerjemah: A. Sunarto, Surabaya, Al-Hidayah, Jilid II, t.t
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU perkawinan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, Cet.3, 2009
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, 2010
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2007
- Budiman Sinaga, *Hukum Konstitusi*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta, 2005
- Dahlan Thalib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada,1997
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008
- Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Universitas LPPM, 1995

